

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	KORAN TEMPO	12	5-8-2002

# Pertamina Batal Beli Caraka Jaya

"Permintaan hibah perlu persetujuan Departemen Keuangan."

JAKARTA — Pertamina tidak jadi membeli dua *shipset* atau komponen kapal Caraka Jaya, proyek milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada waktu itu diketuai B.J. Habibie.

Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Caraka Jaya Nugraha Suknawidjaja mengungkapkan bahwa Pertamina mundur dari rencana pembelian itu karena kapal Caraka tidak dirancang sebagai kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM), tetapi sebagai kapal pengangkut barang dan orang. Dengan demikian, spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan kebutuhan Pertamina. "Karena itu, Pertamina mengalihkannya dengan cara membuka tender pengadaan kapal tanker BBM sekarang," kata Nugraha, yang juga Direktur Logam, Mesin, dan Maritim Deperindag.

Kendati demikian, dia melanjutkan, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berminat pada dua komponen Caraka yang semula diminati Pertamina itu. Pusri akan memanfaatkannya sebagai kapal curah pupuk. Karenanya, Pokja menyarankan tim negosiasi Jakarta Llyod untuk terus melakukan kontak dan negosiasi dengan Pusri hingga akhirnya kontrak ditandatangani. "Jakarta Llyod mestinya mengejar terus tawaran Pusri hingga menjadi kontrak," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pusri Zaenal Soedjais mengata-

kan, pihaknya sangat berminat pada Caraka Jaya karena harganya cukup murah. Dalam proposal yang sudah disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Pusri menaksir dua *shipset* Caraka Jaya senilai US\$ 5 juta. Perinciannya, biaya pabrikasinya US\$ 2,775 juta dan belanja material impor US\$ 2,25 juta.

Nugraha menjelaskan, lantaran belum ada kontrak yang siap ditandatangani, proyek Caraka mundur dari jadwal semula akan selesai Juli lalu. Saat ini dua pemerintah daerah juga menyatakan minatnya ke Caraka Jaya, yakni Pemda Maluku Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Sebelumnya, Pemda Merauke menyatakan minat serupa.

Ketiga pemda tersebut meminta pemerintah pusat memberikan komponen tadi sebagai hibah. Kemudian, komponen itu akan dibangun menjadi kapal dengan Dana Alokasi Umum (DAU) pemda yang bersangkutan. "Mengenai permintaan hibah, perlu persetujuan Departemen Keuangan. Karena, siapa yang harus menanggung utang PT Jakarta Llyod jika komponen Caraka dijadikan hibah."

Menurut Nugraha, bila persetujuan hibah Caraka pada pemda diberikan, harus diiringi persetujuan penghapusan utang Jakarta Llyod agar bebannya lebih ringan. Ia menghitung, pada kondisi sekarang satu komponen kapal Caraka Jaya bernilai

Rp 16 miliar. Saat ini proyek Caraka Jaya tinggal menyisakan 15 komponen dari 30 komponen kapal.

"Hari ini (5/8), Menperindag Rini M.S. Soewandi akan mengundang Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution. Mereka akan membicarakan kemungkinan penghapusan utang atau *write off* dan mengalihkannya jadi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Jakarta Llyod," ujar Nugraha.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) Deperindag Achdiat Atmawinata membenarkan bahwa permintaan hibah komponen kapal Caraka Jaya oleh pemda ter-

gantung pada persetujuan Departemen Keuangan. Karena dengan demikian utang-utang Jakarta Llyod harus dihapus dan jadi PMP. Tujuannya, memperlancar *cashflow* atau arus kas Jakarta Llyod.

Mengenai permintaan hibah Caraka oleh Indonesian National Shipowners Associations, Achdiat menilai, permintaan hibah oleh swasta sulit diberikan. "Komponen kapal Caraka yang milik pemerintah akan lebih baik manfaatnya jika dihibahkan ke Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD), tetapi tidak pada swasta yang mementingkan keuntungan."

Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan bahwa proyek Caraka Jaya merupakan salah satu proyek yang dibiayai *two step loan* (pinjaman dua tahap). Dulu, ujar dia, pemerintah meminjam dana ke luar negeri dalam bentuk dolar, kemudian dana pinjaman itu disalurkan (dipinjamkan) dalam rupiah, salah satunya untuk proyek Caraka Jaya. "Pinjaman itu macet. Ini yang repot karena akuntabilitasnya harus jelas."

Ia mengingatkan, pinjaman yang macet tidak bisa dijadikan penyertaan modal pemerintah begitu saja, "Siapa yang harus bertanggung jawab, harus jelas dulu." Alasannya, dari sisi kurs saja pemerintah sudah menanggung kerugian besar. Kurs rupiah saat pinjaman diterima baru berkisar sekitar Rp 2.000 per dolar, sementara saat ini Rp 9.000 per dolar. "Jadi, harus dipikirkan benar-benar proyek itu mesti dilanjutkan atau pemerintah *cut loss* saja." ● teguh/syakur